

**IMPLEMENTASI MASTER PLAN KEGIATAN SERAYU RIVER
VOYAGE (SRV) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas)**

**Oleh :
Imam Pamungkas¹, Agus Suryono², Sarwono³**

¹Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya
¹*imam_pamungkas17@yahoo.co.id*

Abstract

The background of research is that Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) that compiled by department of tourism and culture Banyumas Regency in 2007 but the implementation has not been in line with expectations and stagnation. That Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) expected completed within five years from 2008 to 2012, but during the period until 2013 programs and activities in the Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) most have not been implemented. The results showed that the Master Plan of Activities Serayu River Voyage (SRV) in the Framework of Tourism Development in Banyumas Regency has not been implemented properly the cause is is the absence of good coordination between agencies, the lack of integration of programs and activities (overlap), supporting documents have not been revised, no good socialization, and the role of the private sector is still lacking. The actors that constrain and support implementation of the Master Plan Activity Serayu River Voyage (SRV) is supporting factors : competent human resources (implementor) already available at the managerial level and who have intellectual tourism, only need to be added to personnel in the field of culture , pamong budaya. The availability of adequate budget. Institutions that have been effective and efficient. High community response. High commitment of Regent Banyumas and cooperation related parties (stakeholders). Natural conditions Serayu tend to calm the river slope condition (i) is small. The constrain factors: regulatory policies, integration of programs and activities, Coordination and socialization that occurs sectoral ego that it is time to be addressed

Keywords : implementation, master plan, serayu river voyage, human resources, regulation

A. PENDAHULUAN

Aliran Sungai Serayu yang melintasi Kabupaten Banyumas memiliki topografi relatif datar dan berupa pegunungan dengan kemiringan antara 15⁰- 45⁰ dan

merupakan aliran yang sudah mendekati daerah hulu dan adanya Bendung Gerak Serayu yang berfungsi sebagai 1) pengairan 2) air minum 3) pengendali sungai 4) pengendali banjir 5) perikanan darat dan 6) rekreasi. Fungsi yang terakhir sebagai sarana rekreasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas.

Kegiatan dalam rangka Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bersifat parsial dan tidak terstruktur dengan baik, dan kecenderungannya dilaksanakan secara sektoral serta belum terlihat adanya peran aktif dari stakeholders.

Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas yang diharapkan bisa menjadi destinasi wisata yang baru belum dilaksanakan sesuai ekspektasi masyarakat dan pemerintah daerah, dugaan hal tersebut disebabkan karena adanya faktor-faktor penyebab antara lain: kurang koordinasinya antar para pemangku kepentingan di daerah, sumberdaya manusia yang masih terbatas, kelembagaan yang masih belum maksimal, regulasi yang masih perlu direvisi, belum adanya redesign yang mengakomodir semua rencana kegiatan, belum adanya dokumen lingkungan, kurang adanya peran dari private sektor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau dilaksanakan oleh pengelola barang. Pengelola barang dimaksud adalah Menteri Keuangan, karena tanah tersebut adalah milik pemerintah pusat.

Menurut Hadinoto (1996) tanah dalam program pengembangan pariwisata merupakan sumberdaya paling kritis dikelola. Tanah yang salah penggunaannya bisa menyebabkan kerusakan dan kerugian besar bagi kepariwisataan. Penggunaan tanah memberi tantangan kreatif dan juga terbuka bagi kesalahan dan kehilangan dalam pengembangan pariwisata. Dalam perencanaan dan pengembangan suatu program pariwisata, perencanaan dan penggunaan tanah dapat menjadi tanggung jawab paling penting. Sedangkan kriteria evaluasi manajemen mengenai kebutuhan

dan kesesuaian tanah untuk pengembangan pariwisata meliputi :a). lokasi, b). pemandangan, c), kesesuaian lingkungan, d). topografi, e). ketersediaan, f). kawasan yang bisa dipakai.

Kesimpulannya bahwa peranan lahan atau tanah dalam pengelolaan pengembangan pariwisata adalah menjadi faktor utama dan sebagai prioritas untuk dikelola, sehingga pengadaan tanah dan pemanfaatannya harus status tanah yang jelas. Sedangkan sarana dan prasarana wisata yaitu : a). bandara, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, b). telekomunikasi, dan c). jaringan jalan dan lain-lain (Yoeti, 1994).

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan jarak dekat, menengah, dan jauh. Sehingga diperlukan alat-alat transportasi Sammeng (2001). Sumberdaya lahan untuk transportasi juga menjadi bagian integral yang diperlukan sebuah perencanaan sumberdaya lahan yang baik.

Pengembangan sumberdaya lahan juga menghadapi masalah ketidak selarasan antar berbagai kepentingan dan berbagai sektor ekonomi yang pada gilirannya akan menjadi tidak saling mendukung satu dengan lainnya. Keadaan ini akan diperburuk lagi dengan sistem pengelolaan sumberdaya lahan yg serampangan.

Hadinoto (1996:79), menyebutkan termasuk dalam tahapan perencanaan konseptual adalah pemilihan lahan wisata & alokasi guna lahan dan pengawasan penggunaannya serta anggaran.

Menurut Fennel (1999:68) dikutip dalam Pitana dan Diarta (2009) menyebutkan bahwa sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya adalah air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau, sungai, dan sebagainya (sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan sebagainya).

Menurut Hakim (2004) menyebutkan istilah wisata berkelanjutan. Keseimbangan antara wisata dan pembangunan sektor ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepuasan antara kedua belah pihak (yaitu wisatawan dan masyarakat lokal) merupakan pokok-pokok pikiran dalam menginterpretasikan

wisata berkelanjutan. Hunter (2002) dalam Hakim (2004:11) menyebutkan “it is easy to discuss sustainability. Implementation is the problem” (sering muncul dalam wacana dan diskusi pembangunan berkesinambungan, termasuk industri wisata. Menurut Mihalic (2000) dalam Hakim (2004 : 116) menyatakan kualitas lingkungan meliputi kualitas bentang alam atau pemandangan alamiah itu sendiri, yang kualitasnya dapat menurun karena aktivitas manusia.

Kesimpulannya bahwa sumberdaya alam seperti air dan sungai khususnya dalam program Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) di Kabupaten Banyumas dapat dikembangkan sebagai sumberdaya pariwisata dan tujuan wisata. Pengembangan sumberdaya alam ini harus seimbang antara sektor ekonomi dan perlindungan lingkungan dan harus selalu dijaga dengan baik sehingga kualitasnya tidak akan menurun seiring dengan aktivitas manusia dan pariwisata itu sendiri.

Tujuan dari penelitian Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas, yaitu :

1. Untuk mengetahui isi perencanaan dalam Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) yang akan diimplementasikan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV)?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV)?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut pendapat Sugiyono (2009) bahwa penelitian kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun melaksanakan kualitatif, peneliti kualitatif harus mampu melepaskan teori dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan penelitian.

Fokus penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) yang akan diimplementasikan, meliputi : a). Potensi wisata pendukung pengembangan SRV, b). Fungsi ruang kawasan Sungai Serayu, c). Potensi lahan, dan d). Aksesibilitas
2. Hasil implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV), meliputi analisis Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) menurut Periode Perencanaan dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV), meliputi : a). Faktor internal pendukung dan penghambat dan b). Faktor eksternal pendukung dan penghambat

Tahap-tahap dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tahap memasuki lokasi penelitian.

Peneliti memasuki lokasi di wilayah Kabupaten Banyumas dengan situs penelitian yaitu di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan di beberapa SKPD yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Tahap dilokasi penelitian.

Tahap ini adalah menjalin hubungan personal yang lebih mendalam dan harmonis dengan berbagai sumber informasi dengan harapan mendapatkan data-data dan informasi-informasi yang akurat serta relevan. Hubungan personal juga bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kredibilitas peneliti, komunikasi interpersonal yang persuasif juga diperlukan terutama untuk memperoleh informasi yang sangat sensitif.
3. Mengumpulkan data.

Peneliti memasuki tahapan mengumpulkan data melalui :

 - a. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur berdasarkan pada pedoman wawancara, serta wawancara yang tidak terstruktur untuk mengembangkan hal-hal yang memerlukan informasi mendalam.
 - b. Observasi, yaitu meneliti secara langsung di lapangan melalui panca

indera terhadap fenomena permasalahan, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagai informasi dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan terkait dengan Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV). Dokumentasi digunakan sebagai bahan acuan referensi dan data awal dalam melakukan penelitian dan wawancara, serta bahan pembanding dengan informasi yang didapatkan dari penelitian lapangan dan wawancara tersebut. Data dan dokumentasi antara lain : dokumen Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV), peraturan perundangan yang berlaku seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati dan dokumen lain yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas

1. Potensi wisata pendukung pengembangan SRV

Kegiatan kebudayaan sebagai potensi wisata yang mendukung Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) sudah ada zonasi pengembangan budaya di kawasan Bendung Gerak Serayu, yang terdiri dari obyek wisata Kalibacin, masyarakat adat Kali Tanjung dan rencana pembangunan gua Jepang. Rencana pembangunan gua Jepang sudah ada perencanaan kawasan dan DED akan tetapi belum berjalan karena faktor kepemilikan tanah milik Perhutani.

Kegiatan kesenian antara lain : Lengger calung asli seni Banyumasan, Tarian Kiprah Baladewan. Kerajinan batik Banyumas, Angguk yaitu kesenian dengan tabuhan musik Islami dengan alat musik berupa terbang, bedug dan kendang.

Kesenian yang lain yaitu sinden lanang dan lengger lanang, calung, gondolio (alat musik dari bambu dengan menggunakan nada gending dengan

pemain 24 orang), Buncis (alat musik dari bambu dengan nada khusus dengan pemain sampai 5 orang). Potensi wisata alam untuk rumah makan, jungle tracking, outbound, pengenalan anak terhadap alam (wisata konservasi).

Potensi wisata pendukung pengembangan Serayu River Voyage (SRV) sesuai dengan teori Damanik dan Weber (2006:2) sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah :

- a. Keajaiban dan keindahan alam (topografi),
- b. Keragaman flora,
- c. Vegetasi alam,
- d. Ekosistem yang belum terjamah manusia,
- e. Rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai),
- f. Lintas alam (trekking, rafting, dan lain-lain).

Kondisi alam di kawasan Sungai Serayu dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata karena mempunyai potensi antara lain : lokasi geografis, iklim dan cuaca yang sejuk, topografi yang strategis, ketersediaan air, dan vegetasi. Kondisi sumberdaya alam tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fennel (1999) dalam Pitana dan Diarta (2009).

2. Potensi lahan

Potensi lahan di sepanjang sempadan Sungai Serayu khususnya di sekitar kawasan Bendung Gerak Serayu berpotensi besar untuk kegiatan perekonomian oleh masyarakat sekitar. Kegiatan masyarakat tersebut antara lain : perikanan dan pengembangan desa wisata. Potensi lahan dengan kebutuhan lahan yang sudah ada menunggu realisasi sewa lahan dari pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas hal tersebut bisa dilakukan dengan sistem “pinjam pakai”. Perencanaan dalam penggunaan lahan tersebut sesuai dengan teori perencanaan pembangunan menurut Waterson (1965) dalam Buntari (1992) perencanaan tata guna tanah atau perencanaan fisik atau juga perencanaan urban dan regional. Perencanaan ini mengusahakan pemanfaatan tata ruang atau tanah menurut fungsinya secara optimal, yang ada hubungannya dengan

keseimbangan ekologis antara lain perencanaan kota dan lain-lain

3. Fungsi ruang kawasan Sungai Serayu

- a. Fungsi ruang kawasan area sepanjang tepi Sungai Serayu di wilayah Kecamatan Patikraja merupakan ruang hijau sehingga fungsi lindung kawasan tepi sungai masih terjaga.
- b. Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Rencana pembangunan dermaga diperbolehkan, sedangkan pembangunan fasilitas pendukung seperti : hotel, rumah makan tidak boleh pada kawasan garis sempadan sungai, kecuali untuk taman.
- c. Kebijakan dalam RTRW Kabupaten Banyumas tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh WTO dalam Richardson dan Fluker (2004) seperti dikutip Pitana dan Diarta (2009:88) bahwa pengelolaan pariwisata mencakup kegiatan penyusunan kebijakan yang akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.

4. Aksesibilitas

Aksesibilitas berupa jalan dan jembatan merupakan prasarana umum (general infrastructure) yang harus tersedia dalam implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV). Pembangunan dan peningkatan jalan yang menghubungkan pusat keramaian dan ibu kota kecamatan dengan beberapa lokasi rencana Dermaga SRV sudah cukup memadai. Pembangunan jembatan Linggamas yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dan Purbalingga juga diperkirakan selesai pada tahun 2014.

Pembangunan aksesibilitas tersebut sesuai dengan teori menurut Pitana dan Diarta (2009) proses implementasi kebijakan pariwisata memerlukan beberapa tahapan, salah satunya yaitu lokasi yang cocok yaitu harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur seperti ketersediaan jalan, listrik, air, atraksi wisata yang tersedia, dan pesaing.

D. FAKTOR INTERNAL PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI MASTER PLAN KEGIATAN SERAYU RIVER VOYAGE (SRV) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUMAS.

1. Faktor Internal Pendukung

a. Sumberdaya manusia yang berkompeten (implementor)

Ketersediaan sumberdaya manusia pendukung SRV sesungguhnya sudah cukup banyak antara lain : LSM Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu (PMPS), tokoh masyarakat, seniman-budayawan dan juga Kelompok sadar wisata (pokdarwis). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa terdapat faktor yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan yaitu resources, (sumberdaya). Sumberdaya adalah berupa sumberdaya manusia (kompetensi implementor), sumberdaya materi/fasilitas dan sumberdaya finansial.

Peningkatan sumber daya manusia sektor pariwisata perlu difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, hal tersebut sesuai pendapat WTO dalam Pitana dan Diarta (2009), peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata yaitu membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan pariwisata sesuai dengan pendapat Pitana dan Diarta (2009,114) bahwa kerangka implementasi kebijakan pariwisata salah satunya adalah sumber daya manusia yang menjalankan program kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga turut berperan positif terhadap kesuksesan pariwisata.

b. Ketersediaan Anggaran

Bupati Banyumas sudah menyatakan komitmen terhadap kebijakan anggaran untuk Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) hal tersebut sesuai

dengan pendapat Mill (2000) bahwa dalam proses perencanaan sektor pariwisata juga harus mempertimbangkan komponen perencanaan khususnya perencanaan pariwisata, komponen tersebut antara lain dibutuhkan dana untuk operasi.

Interpretasinya adalah bahwa ketersediaan anggaran tidak menjadi masalah yang berarti karena sudah ada komitmen besar dari decision maker (pembuat keputusan) tinggal menunggu aspek-aspek legalitas dan perizinan.

c. Kelembagaan

Kelembagaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dengan kondisi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi sudah cukup bagus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wahab (2008:137-139) keefektifan implementasi kebijakan perlu memenuhi hal-hal antara lain tepat pelaksanaannya, aktor implementasi kebijakan adalah pemerintah, kerjasama pemerintah-masyarakat/swasta, atau pihak swasta sebagai pelaksana (*privatization* atau *contracting out*).

Kelembagaan merupakan faktor penting hal tersebut sesuai dengan pendapat Edwards III (1980) bahwa terdapat faktor yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan yaitu *bureaucratic structure*. Struktur Birokrasi, struktur organisasi pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang terstandar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Faktor Internal Penghambat

a. Regulasi kebijakan

Regulasi dalam Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) seperti : RPJMD, RIPPDA, RTRW dan Renstra SKPD

sudah ada dan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mill (2000) bahwa dalam proses perencanaan sektor pariwisata juga harus mempertimbangkan komponen perencanaan khususnya perencanaan pariwisata, komponen tersebut yaitu lingkungan legal, hukum dan regulasi khusus bagi sebuah tempat tujuan wisata harus diketahui. Teori lain menurut Pitana dan Diarta (2009) bahwa dalam kerangka implementasi kebijakan pariwisata khususnya regulasi dan pengawasan hal yang harus diimplementasikan adalah bangun mekanisme legislasi dan regulasi untuk mendorong pengembangan pariwisata melalui dukungan organisasi

pariwisata nasional, agen biro perjalanan, akomodasi dan sektor-sektor lain dalam pariwisata. Sedangkan menurut WTO dalam Pitana dan Diarta (2009), peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.

3. Faktor Eksternal Pendukung

a. Respon masyarakat

Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas di respon sangat baik oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa tujuan dan fungsi pokok dari perencanaan pembangunan salah satunya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Pitana dan Diarta (2009,114) Kerangka implementasi kebijakan pariwisata dibuat audit sosial dalam hal bagaimana komunitas lokal, penduduk desa dan masyarakat sekitarnya dipengaruhi oleh pariwisata.

b. Kondisi alam dan faktor cuaca

Kondisi alam dan faktor cuaca sangat mendukung sebagai faktor yang pendukung dalam kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Liu (1994:45) seperti dikutip dalam Pitana dan Diarta (2009:90-91) bahwa kondisi dan keunikan lingkungan, flora dan fauna sering menjadi atraksi kunci bagi pariwisata. Sumber daya air sangat vital perannya dalam menunjang pengembangan pariwisata. Interpretasinya adalah bahwa kondisi alam dan faktor cuaca bisa menjadi faktor yang mendukung Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas.

c. Komitmen para pemangku kebijakan di pemerintah daerah

Bupati Banyumas menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Darwin (2002) menjelaskan bahwa aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, salah satunya yaitu sifat kepentingan yang dipengaruhi. Sebuah proses implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*) (Dwiyanto, 2000).

Interpretasinya adalah bahwa komitmen para pemangku kebijakan di pemerintah daerah menjadi faktor yang mendukung Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas

d. Kerjasama pihak terkait (*stakeholders*)

Kerjasama dengan pihak terkait dalam Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) saat ini sudah dilaksanakan walaupun masih dalam tahapan yang tidak banyak. Kerjasama dengan pihak terkait diperlukan dalam implementasi kebijakan hal tersebut sesuai dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) seperti dikutip dalam Nugroho (2006) bahwa kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses

implementasi adalah keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana. Sedangkan menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2006) variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. Sedangkan menurut WTO dalam Richardson dan Fluker (2004:1830 seperti dikutip dalam Pitana dan Diarta (2009:88) bahwa pengelolaan pariwisata perlu adanya pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan.

Interpretasinya adalah bahwa kerjasama pihak yang terkait (stakeholders) merupakan faktor yang mendukung Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas.

4. Faktor Eksternal Penghambat

a. Keterpaduan program dan kegiatan

Kurang terpadunya Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dengan kebijakan yang lain perlu dibenahi agar implementasi kegiatan Serayu River Voyage SRV berjalan dengan baik. Menurut Nugroho (2006) bahwa perlunya kejelasan dan konsistensi tujuan, ketepatan alokasi sumber dana dan keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana.

Interpretasinya adalah bahwa keterpaduan program dan kegiatan merupakan faktor yang menghambat dalam Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas.

b. Koordinasi dan sosialisasi

Koordinasi dan sosialisasi dalam Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) masih belum baik karena akibat adanya ego sektoral yang terjadi diantara para SKPD terkait.

Kendala tersebut sesuai dengan pendapat Darwin (2002) yang menjelaskan bahwa aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, salah satunya yaitu sifat kepentingan yang dipengaruhi. Sebuah proses implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya

terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser) Dwiyanto (2000).

Menurut Hoogwood dan Gun untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan syarat yaitu komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.

Interpretasinya adalah bahwa kurang koordinasi dan sosialisasi menjadi faktor yang menghambat dalam Implementasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas.

E. ANALISA SWOT IMPLEMENTASI MASTER PLAN KEGIATAN SERAYU RIVER VOYAGE (SRV) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUMAS

1. Kekuatan (strengths)
 - a. Potensi Serayu River Voyage (SRV) sangat memungkinkan dapat dikembangkan untuk rekreasi air, rekreasi darat, rekreasi budaya, dan rekreasi pendidikan.
 - b. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebagai persyaratan Kegiatan Serayu River Voyage dapat dipenuhi.
 - c. Aksesibilitas berupa jalan menuju lokasi Serayu River Voyage sudah tersedia dengan baik.
 - d. Kelembagaan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.
 - e. Peraturan dan kebijakan dalam perencanaan Master Plan, Peraturan Daerah, Renstra dan RPJMD.
2. Kelemahan (weakness)
 - a. Sumberdaya manusia yang berkompetensi masih rendah

- b. Potensi lahan sempadan/bantaran Sungai Serayu
 - c. Lahan untuk RTH belum dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - d. Aksesibilitas masih perlu pemeliharaan rutin
 - e. Peraturan dan kebijakan masih belum diimplementasikan dengan baik.
 - f. Pemahaman yang berbeda terhadap peraturan dan kebijakan
3. Peluang (opportunities)
- a. Memiliki prospek kerjasama pihak swasta (investor)
 - b. Kerjasama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
 - c. Sistem pinjam pakai lahan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dari Pemerintah Pusat
 - d. Peningkatan sumberdaya manusia dan pengadaan pegawai
 - e. Persamaan persepsi terhadap peraturan dan kebijakan dari
4. Ancaman (threats)
- a. SRV mempunyai resiko banjir dan bencana alam.
 - b. Memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan
 - c. Dapat mengancam ekosistem dan kerusakan lingkungan khususnya kerusakan badan sungai, tebing sungai dan kerusakan lainnya
 - d. Dapat mengancam kehidupan sosial budaya masyarakat dan kearifan local (local wisdom).
 - e. Adanya regulasi dan legislasi kebijakan yang harus dievaluasi sebagai pendukung Kegiatan Serayu River Voyage (SRV)

Rekomendasi

Berdasarkan dari uraian kesimpulan yang diambil dari pembahasan dan hasil penelitian, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan dari pelaksana (implementor) dalam pembuatan program dan kegiatan yang mendukung Serayu River Voyage (SRV) dalam Rangka Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyumas, dan memenuhi target-target program dan kegiatan SRV.
2. Meningkatkan pola kerjasama kepariwisataan untuk memperluas dan meningkatkan jaringan pemasaran/potensi promosi wisata khususnya

kegiatan SRV dalam rangka pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas

3. Revisi kebijakan dalam Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) dengan merevisi desain master plan yang dilengkapi titik-titik koordinat lokasi kegiatan SRV secara geografis (peta digital) dan menentukan lokus pemanfaatan lahan atau kebutuhan lahan SRV secara keseluruhan.
4. Pembuatan dokumen lingkungan berupa Amdal yang mencakup seluruh kegiatan dalam tapak SRV secara terpadu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012, untuk kawasan yang bersinggungan dengan kawasan lindung dan kawasan pariwisata dengan semua besaran dokumen lingkungannya adalah Amdal.
5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang memuat dan mengatur tentang pola ruang dan pemanfaatan ruang bagi Impelementasi Kegiatan Serayu River Voyage (SRV). Kepastian hukum tersebut merupakan pegangan bagi setiap para pelaku usaha, pelaku wisata dan masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada kegiatan Serayu River Voyage (SRV).
6. Revisi RIPPDA, dikarenakan belum dilaksanakan dengan baik serta perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2031.
7. Pengajuan perizinan pemanfaatan alur Sungai Serayu dan pada lahan di tepian atau sempadan Sungai Serayu.
8. Penyusunan konsep pola kerjasama dengan pemerintah pusat dalam pemanfaatan dan pemakaian lahan milik pemerintah pusat yang berada di sepanjang tepian Sungai Serayu atau di daerah sempadan sungai. Kerjasama tersebut bisa menggunakan sistem pinjam pakai.
9. Penambahan pegawai dengan kompetensi tertentu yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan aparatur juga bisa melalui berbagai diklat teknis dan workshop serta upaya peningkatan sumberdaya aparatur lainnya.
10. Melaksanakan publikasi, sosialisasi, dengar pendapat (public hearing) dan

promosi melalui media massa cetak dan elektronik dan media informasi lainnya seperti jejaring sosial. Sosialisasi dan publikasi ini harus disampaikan sampai kepada masyarakat bawah juga bisa melalui lembaga masyarakat desa atau kelurahan.

11. Pembuatan sistem data dan informasi dengan membangun sistem data dan informasi pariwisata secara terintegrasi untuk menjamin kontinuitas operasional yang juga berfungsi sebagai informasi pasar
12. Peningkatan anggaran serta penentuan skala prioritas dalam Implementasi Kebijakan Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) .
13. Penentuan skala prioritas dalam pengembangan Sungai Serayu sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan alur sungai pada Bendung Gerak Serayu.
14. Finalisasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) Periode Tahun 2015 meliputi antara lain :
 - a. Revisi desain konstruksi
 - b. Pembuatan dokumen lingkungan
 - c. Pembangunan jalan dan prasarananya
 - d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
15. Finalisasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) Periode Tahun 2016
 - a. Perizinan pemanfaatan lahan sempadan dan alur Sungai Serayu
 - b. Penyusunan konsep pola kerjasama
 - c. Penyusunan rancangan revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
16. Finalisasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) Periode Tahun 2017 antara lain:
 - a. Pembangunan Fisik Tahap I Dermaga I SRV di Lokasi Bendung Gerak Serayu
 - b. Penambahan dan peningkatan sumber daya manusia bidang pariwisata
 - c. Pelaksanaan pola kerjasama
 - d. Pembangunan Fisik Tahap II Dermaga I SRV di Lokasi Bendung Gerak

Serayu

- e. Pembangunan Fisik Dermaga II SRV di Lokasi Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja
17. Finalisasi Master Plan Kegiatan Serayu River Voyage (SRV) Periode Tahun 2018 antara lain:
- a. Pembangunan Fisik Dermaga IV SRV di Lokasi Desa Petir Kecamatan Sokaraja
 - b. Sosialisasi dan publikasi
 - c. Pembangunan Fisik Dermaga III SRV di Lokasi Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor
 - d. Pembuatan paket wisata
 - e. Penyusunan sistem kawasan wisataPelaksanaan Pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Rajawali
- _____. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agung, Artini, 2013. “Strategi Pengembangan Muara Sungai Yeh Matan sebagai Objek Wisata Air di Desa Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan”: *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2013, halaman 297-306. Buntari, 1992. *Administrasi Pembangunan*. Purwokerto : Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2013.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004. *Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta*.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta*
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta*

- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai*. Jakarta
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2003. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 tentang *Pedoman Umum dan Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014*. Jakarta
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Dwiyanto, Agus. 2000. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Hadinoto, Kusudianto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta : UI-Press
- Hakim, Luchman, 2004. *Dasar-dasar Ekowisata*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jupir, Maksimilianus Maris. 2013. *“Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat)”* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Kartini, Yosephina Harmis dan Sadharto M.R. Djarot. 2013. *“Kajian Penggunaan Wisata Tirta Sungai di Kota Jambi”*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Mill, Robert Christie. 2000. *Tourism The International Business*, diterjemahkan oleh Tri Budi Sastrio. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- M.L., Jhingan, 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (The Economics of Development and Planning)*, diterjemahkan oleh D Guritno. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nadiasa, Mayun; Maya D.N.K. Widnyana; Norken I.N. 2010. *“Analisis Investasi Pengembangan Potensi Pariwisata pada Pembangunan Waduk Jehem di Kabupaten Bangli”*. Bali : Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar
- Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2010. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2010 tentang *Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas*
- Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2009. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas*.

- Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2010. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2010 *tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas*
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G, 2005. *Sosiologi Pariwisata Kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata* . Yogyakarta : CV Andi Offset (Penerbit Andi)
- Pitana, I Gde dan Surya Diarta, I Ketut, 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : CV Andi Offset (Penerbit Andi)
- Pratama, Prianto, Pribadi, 2012. “Taman Rekreasi Bendungan Serayu Banyumas”: *IMAJI*, Volume 1, Nomor 1, 1 Januari 2012.
- Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta : Balai Pustaka
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, (eds.), 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Spillane, James J,1991. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CVAlfabeta.
- Suja, Budiarta, 2012. “Model Pengembangan Ekowisata Danau Buyan Sebagai Objek Wisata di Bali”: *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2012, Halaman 111.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Wahab, Salah. 1992. *Manajemen Pariwisata (Tourism Management)*, diterjemahkan oleh Frans Gromang. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- _____1992. *Pemasaran Pariwisata (Tourism Marketing)* diterjemahkan oleh Frans Gromang. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Widiantara dan Artana, 2012. “Strategi Pengembangan Sungai Ayun Sebagai Salah Satu Eco-lodge dan Eco-recreation sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Sidemen, Karangasem, Bali”: *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Volume 3, Nomor 1, Agustus 2013, Halaman 63.
- Widiantara dan Wisnawa, 2013. “Strategi Pengembangan Eco-lodge dan Eco-recreation sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Sidemen, Karangasem, Bali”: *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Volume 3, Nomor 1, Agustus 2013,

Halaman 63.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

WTO.1980. *Social and Cultural Impact of Tourism Movement, World Tourism Organization*. Madrid : WTO

Yoeti, Oka A. 1994. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa.

_____. 2003. *Tours and Travel Marketing*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.